

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia yang dilakukan secara berkelanjutan yang memiliki sasaran untuk menciptakan landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia yang bertujuan untuk mampu dan berkembang menuju masyarakat adil dan makmur serta merata berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Indonesia sebagai negara berpenduduk terbesar keempat di dunia seharusnya bisa menjadi negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat sesuai dengan keadaan negaranya karena pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator yang sangat penting dalam melakukan analisis pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara.

Tujuan pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara di dunia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta untuk mencapai keseimbangan internal maupun eksternal. Keseimbangan internal adalah terwujudnya pertumbuhan ekonomi karena pertumbuhan ekonomi menunjukkan seberapa jauh aktivitas perekonomian menghasilkan dan bertambahnya pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu.

Selain dari pertumbuhan ekonomi, keseimbangan internal juga bisa dilihat dari terjadinya kestabilan harga-harga serta terjadinya tingkat pengerjaan yang optimal. Sedangkan keseimbangan eksternal adalah keseimbangan dalam neraca luar negeri baik neraca pembayaran maupun neraca perdagangan.

Tingkat keberhasilan perekonomian suatu negara yang telah dicapai dapat diukur melalui konsep kesempatan kerja yang dapat diciptakan atau dihitung dari jumlah orang yang telah bekerja. Dalam pembangunan ekonomi Indonesia, kesempatan kerja masih menjadi masalah utama. Hal ini timbul karena adanya kesenjangan atau ketimpangan untuk mendapatkannya.

Pokok dari permasalahan ini bermula dari kesenjangan antara pertumbuhan jumlah angkatan kerja disatu pihak dan kemajuan berbagai sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja di pihak lain. Seperti yang kita ketahui bahwa pada UUD 1945 Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, dengan demikian kesempatan kerja merupakan masalah yang mendasar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Karena itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat menyebabkan perubahan-perubahan dalam output dan kesempatan kerja, sehingga setiap warga negara dapat memperoleh pekerjaan dan menempuh kehidupan yang layak.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa terjadi perubahan patern perekonomian pasca krisis dari usaha yang padat karya ke usaha yang lebih padat modal. Akibatnya pertumbuhan tenaga kerja yang ada sejak tahun 1998 s/d 2004 terakumulasi dalam meningkatnya angka pengangguran. Dilain sisi, pertumbuhan tingkat tenaga kerja ini tidak diikuti dengan pertumbuhan usaha (investasi) yang dapat menyerap keberadaannya. Akibatnya terjadi peningkatan jumlah pengangguran di Indonesia yang pada puncaknya di tahun 2004 mencapai tingkat 10% atau sekitar 11 juta orang.

Pada dasarnya angka pengangguran di Indonesia mengalami tren menurun sejak tahun 2006. Pada tahun 2005 pengangguran berada pada angka 11,24 persen sedangkan pada agustus 2010, angka pengangguran di Indonesia mencapai 7,14 persen. Namun angka tersebut masih terbilang tinggi bila dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura yaitu 3,1 persen dan 2,1 persen. Selain itu memasuki tahun 2011, pengangguran terbuka berada pada angka 9,25 juta orang.¹

Masalah kesempatan kerja biasanya muncul bila laju pertumbuhan penduduk lebih besar dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi. Besarnya jumlah dan pertumbuhan angkatan kerja yang diiringi dengan terbatasnya kemampuan kesempatan kerja akan menimbulkan pengangguran. Perencanaan kesempatan kerja merupakan hal yang penting, mengingat tingginya tingkat pengangguran yang menunjukkan kecenderungan meningkat dan keharusan menciptakan kesempatan kerja bagi angkatan kerja baru setiap tahunnya.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, pemerintah telah menempatkan penciptaan kesempatan kerja produktif sebagai salah satu sasaran pokok dalam agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menurunkan tingkat pengangguran terbuka dari 9,5 persen menjadi 5,1 persen pada akhir tahun 2009. Namun perencanaan ini tidaklah mudah karena kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya membaik, khususnya diukur dari laju pertumbuhan ekonomi nasional yang masih berada di bawah 5 persen dalam periode 1998-2003.² Dengan melihat keadaan perekonomian di negara ini seharusnya pemerintah lebih menggalakkan investasi

¹ <http://www.pusdalibang.jabarprov.go.id/pusdalibang> (diakses tanggal 16 November 2013)

² <http://www.okezone.com> (diakses tanggal 18 November 2013)

di usaha yang bersifat padat karya dibandingkan dengan padat modal dalam rangka menyerap kelebihan tenaga kerja yang ada.

Wakil Presiden Boediono menginstruksikan kepada Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II untuk mengutamakan kegiatan yang dapat memperluas dan menciptakan kesempatan kerja, guna mengantisipasi perlambatan ekonomi nasional. Dikatakan Wapres penciptaan lapangan kerja adalah prioritas kabinet dan semua paham bahwa faktor terbesar penciptaan lapangan kerja adalah pertumbuhan ekonomi. Ketika pertumbuhan ekonomi sekarang melambat, penciptaan lapangan kerja baru agak kendor. Wapres mengatakan untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah harus mengarahkan pertumbuhan ekonomi yang lebih pelan itu ke sektor yang banyak menciptakan lapangan kerja, misalnya padat karya.³

Langkah lain yang tak kalah penting adalah dengan memperbaiki efisiensi pasar tenaga kerja. Penyebab ketidakcocokan ini bisa karena kualitas informasi yang kurang baik maupun kurangnya pelatihan dan bimbingan pada tenaga kerja.

Perluasan kesempatan kerja disamping dipengaruhi oleh adanya pertumbuhan ekonomi, juga dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah dan tabungan masyarakat yang digunakan sebagai dana investasi. Selain hal tersebut, perluasan kesempatan kerja dan penggunaan tenaga kerja yang produktif serta pemberian upah yang layak juga sangat berperan dalam menentukan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

³ <http://www.antaraneews.com/berita/396247/wapres-minta-menteri-ciptakan-kesempatan-kerja> (diakses tanggal 20 November 2013)

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) mencatat sekitar 32 persen dari jumlah lowongan kerja yang tersedia sepanjang tahun 2010 ternyata tidak dapat terisi pencari kerja. Hal ini ternyata disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan serta tidak sesuainya keahlian dan keterampilan yang dimiliki pencari kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, menilai bursa kerja memiliki nilai penting dan strategis untuk mempercepat penempatan tenaga kerja secara praktis, efisien, dan efektif serta membantu pencari kerja untuk menemukan pekerjaan yang diinginkan.

Berdasarkan penilaian akan pentingnya program bursa kerja, Kemenakertrans pun bekerja sama dengan dinas-dinas tenaga kerja dan universitas untuk mengadakan Bursa Kerja Online (BKOL) yang tersambung secara online. Adapun salah satu solusi yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah kerja yang terisi adalah para pencari kerja dapat memanfaatkan keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk meningkatkan keahlian dan keterampilannya sehingga bisa sesuai dengan kualifikasi kebutuhan tenaga kerja di perusahaan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Agustus 2013 mencapai 118,2 juta orang, berkurang tiga juta orang dari jumlah angkatan kerja pada Februari 2013. Kepala BPS Suryamin mengatakan jumlah tersebut dibandingkan Agustus tahun lalu bertambah 140 ribu orang. Suryamin menambahkan dari seluruh angkatan kerja tersebut, jumlah penduduk

yang bekerja sebanyak 110,8 juta orang, berkurang 3,2 juta orang dari jumlah angkatan kerja yang bekerja pada Februari 2013.

Suryamin menjelaskan pula bahwa tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada Agustus 2013 mencapai 6,25 persen atau meningkat dari Februari 2013 yang tercatat 5,92 persen dan Agustus 2012 yang sebesar 6,14 persen. Pada Agustus 2013, penduduk bekerja pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar ke bawah masih mendominasi, yaitu sebanyak 52 juta orang atau 46,95 persen, pada jenjang pendidikan diploma 2,9 juta orang atau 2,64 persen dan pendidikan universitas 7,6 juta orang atau 6,83 persen.⁴

Tabel I.1
Angkatan Kerja di DKI Jakarta Tahun 2012-2013 (Ribuan Orang)

Kegiatan Utama (1)	Agustus 2012 (2)	Februari 2013 (3)	Agustus 2013 (4)	Perubahan kol (4) – kol (2) (5)
1. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas	7.502,19	7.545,04	7.607,88	105,69
2. Angkatan Kerja	5.368,57	5.163,95	5.180,01	-188,56
a. Bekerja	4.838,60	4.650,78	4.712,84	-125,76
b. Menganggur	529,98	513,17	467,18	-62,80
3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK %)	71,56	68,44	68,09	-3,47
4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT %)	9,87	9,94	9,02	-0,85

Sumber: Berita Resmi Statistik Provinsi DKI Jakarta 2013

⁴ <http://www.antaraneews.com/berita/403834/bps-jumlah-angkatan-kerja-berkurang-tiga-juta-orang> (diakses tanggal 19 November 2013)

Berdasarkan Tabel I.1 di atas, khusus keadaan tenaga kerja di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada Agustus 2013 jumlah angkatan kerja di Provinsi DKI Jakarta mencapai 5,18 juta orang, sedangkan jumlah penduduk yang bekerja sebesar 4,71 juta orang, berkurang 126 ribu orang jika dibandingkan dengan keadaan di bulan Agustus 2012. Di samping itu, pada periode waktu yang sama tingkat pengangguran terbuka di Jakarta mencapai 9,02 persen, mengalami penurunan sebesar 0,85 poin dibandingkan agustus 2012.⁵ Dari 4,71 juta penduduk yang bekerja sampai dengan Agustus 2013, pekerjaan yang paling banyak terserap adalah sebagai buruh/karyawan sebesar 3,17 juta orang. Hal tersebut dapat dimaklumi mengingat sebagian besar lapangan pekerjaan di Jakarta berada di sektor industri yang membuat buruh menjadi pekerjaan yang paling banyak dibutuhkan di sektor ini.

Meskipun tingkat pengangguran diketahui mengalami penurunan, tingkat pendidikan para pekerja di Jakarta masih didominasi pekerja yang berpendidikan setingkat SMP ke bawah. Hal ini sangatlah memprihatinkan melihat di kota besar seperti DKI Jakarta yang notabene merupakan Ibukota negara Indonesia, para pekerjanya masih banyak yang memiliki pendidikan hanya setingkat SMP ke bawah.

Melihat betapa pentingnya peranan kesempatan kerja maka ada beberapa faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi kesempatan kerja. Faktor-faktor tersebut diantaranya tingkat pendidikan, kemajuan teknologi, dan investasi, serta tingkat upah juga menjadi pemicu dalam hal pengadaan kesempatan kerja.

⁵ Berita Resmi Statistik Provinsi DKI Jakarta 2013

Faktor pertama yang diketahui dapat mempengaruhi kesempatan kerja adalah tingkat pendidikan. Di negara berkembang, tingkat pendidikan merupakan suatu masalah karena dapat mempengaruhi kesempatan kerja. Kondisi pendidikan di Indonesia sendiri secara umum masih berada dalam tahap memprihatinkan. Mayoritas masyarakat Indonesia hidup miskin dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah akibat kurangnya pemberdayaan, pengembangan, dan perlindungan terhadap pemuda Indonesia.

Secara umum terbukti bahwa semakin berpendidikan seseorang maka semakin baik pula tingkat pendapatannya. Hal ini dimungkinkan karena orang yang berpendidikan lebih produktif dibandingkan dengan yang tidak berpendidikan. Produktivitas tersebut dihasilkan karena memiliki keterampilan teknis yang diperoleh dari pendidikan. Oleh karena itu salah satu tujuan yang harus dicapai oleh pendidikan adalah mengembangkan keterampilan hidup yang sejatinya dapat mengembangkan *life skill* yang dimiliki oleh masing-masing individu.

Selain dari tingkat pendidikan, faktor lain yang diperkirakan ikut mempengaruhi kesempatan kerja di Jakarta adalah faktor kemajuan teknologi yang diperkirakan ikut mempengaruhi tersedianya kesempatan kerja di lapangan. Kemajuan teknologi menyebabkan banyak perusahaan yang lebih memilih menggunakan peralatan canggih seperti mesin-mesin dalam menjalankan produksinya yang menyebabkan berkurangnya kesempatan kerja.

Banyak perusahaan yang pakai mesin daripada buruh, seperti sepatu, tekstil, lalu makanan dan minuman. Kemudian UU Tenaga Kerja menyebabkan

labour industry (industri yang banyak menyerap tenaga kerja) lebih memilih outsourcing. Hal itulah yang menyebabkan jumlah pengangguran bertambah dan kesempatan kerja menjadi berkurang.

Determinan lain yang penting adalah investasi. Tahun 2000 merupakan titik balik bagi investasi dalam negeri meskipun belum kembali ke posisi sebelum krisis. Perbaikan tersebut ditandai dengan meningkatnya permohonan investasi baik PMDN maupun PMA dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, keadaan investasi asing pasca krisis lebih cenderung berekspansi ke sektor jasa perdagangan besar, eceran, restoran, dan hotel.

Tabel I.2
Perkembangan Investasi DKI Jakarta Tahun 2004-2013

Tahun	PMA (US\$ Ribu)	PMDN (US\$ Ribu)
2004	1.365.211,0	363,55
2005	3.272.242,5	259
2006	1.479.753,0	335,66
2007	4.700.471,5	486,08
2008	9.927.781,1	189,6
2009	5.511.061,0	931,38
2010	6.429.269,3	506,05
2011	4.824.078,8	1.063,95
2012	4.107.721,0	910,45
2013	2.589.891,2	488,67
Jumlah	44.207.480,40	5.534,39

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 2013

Realisasi investasi di Jakarta pun tidak luput dari fluktuasi. Berdasarkan tabel I.2 diatas, diketahui bahwa pada setiap tahun investasi yang masuk ke Provinsi DKI Jakarta selalu fluktuatif setiap tahunnya. Selama kurun waktu 2004 – 2013, jumlah investasi PMA tertinggi diterima Jakarta pada tahun 2008 yang

mencapai 9,9 milyar dolar tetapi jumlah itu menurun di tahun berikutnya menjadi 5,5 milyar dolar pada tahun 2009. Namun, pencapaian PMA tersebut tidak diikuti oleh PMDN yang pada tahun 2012 hanya mencapai 910 ribu dolar. Padahal di tahun sebelumnya PMDN yang masuk ke Jakarta sempat mencapai 1 juta dolar lebih.⁶

Menurut Mahendra, pemerintah akan mendorong pemodal di dalam negeri untuk terus menambah investasinya. Di antaranya dengan mempercepat pelayanan publik. Oleh karena itu, pihaknya akan mendorong pembayaran pajak secara *online*, penyederhanaan penerbitan SIUP dan TDP, juga penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).⁷

Realisasi investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) hingga semester I 2013 sendiri tercatat mencapai Rp192,8 triliun.⁸ Namun pemerintah meyakini untuk target investasi 2013 akan terpenuhi pada akhir tahun sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu Rp 390 triliun, disebabkan jelang pemilu investasi diperkirakan meningkat.

Selain faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, faktor lain yang diperkirakan ikut mempengaruhi kesempatan kerja adalah upah. Upah sendiri sebenarnya sudah sering dibahas seiring dengan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk seluruh provinsi di Indonesia yang berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) untuk para pekerja di masing-masing provinsi.

⁶ www.jakarta.bps.go.id (diakses tanggal 19 November 2013)

⁷ *Ibid*

⁸ <http://www.antarane.ws.com/berita/396958/wamenkeu-optimistis-target-investasi-2013-bisa-tercapai> (diakses tanggal 19 November 2013)

Diketahui pula bahwa dengan diberlakukannya upah minimum provinsi (UMR), para pekerja memiliki rasa aman dan jaminan bahwa upah yang mereka terima tidak akan kurang dari aturan UMR yang berlaku. Namun disisi lain yaitu disisi pengusaha, penetapan UMR bagi para pekerja membuat mereka harus mengeluarkan biaya lebih, karena dengan adanya hal tersebut tanpa melihat seberapa besar produktivitas para pekerja, upah atau bayaran yang mereka terima akan tetap setiap bulannya.

Pada dasarnya upaya mensejahterakan buruh melalui konsep KHL (Kebutuhan Hidup Layak) dalam UU No 13/2003 Pasal 89 (1) dianggap cukup ideal, namun belum jelas kapan bisa diberlakukan, sampai sekarang ini *political will* yang masih lemah dari pemerintah. Sehingga penetapan upah buruh sampai sekarang ini tetap didasarkan atas KHM sebagaimana surat edaran Menakertrans ke seluruh gubernur tanggal 16 Juli 2004.

Makna dari upah minimum ini adalah sebagai jaring pengaman terhadap buruh supaya tidak dieksploitasi dan upah yang tidak layak. Karena upah bagi buruh menyangkut nasib dan kehidupannya yang selama ini dibutuhkan untuk kepentingan buruh dan keluarga.

Pengaruh proses transformasi struktural pada perekonomian Indonesia semasa Orde Baru telah menggeser struktur ekonomi dari dominan pertanian menjadi dominan industri. Prioritas ekonomi nasional yang sebelumnya lebih dititikberatkan pada sektor pertanian, mulai dikurangi, sedangkan peranan sektor-sektor khususnya industri dan jasa semakin ditingkatkan.

Seperti yang diketahui bahwa penetapan upah minimum di Indonesia mengalami kenaikan setiap tahunnya di seluruh provinsi, tak terkecuali di Provinsi DKI Jakarta. Berikut adalah tabel upah minimum di DKI Jakarta.

Tabel I.3
Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2001-2013

Tahun	UMR / UMP	Tanggal Berlaku	Kenaikan	UMR / UMP dlm US\$
2001	Rp426,257	1-Jan-01	23.8%	\$41,78
2002	Rp591,266	21-Jan-02	38.7%	\$63,68
2003	Rp631,554	1-Jan-03	6.8%	\$73,60
2004	Rp671,550	1-Jan-04	6.3%	\$75,22
2005	Rp711,843	1-Jan-05	6.0%	\$73,43
2006	Rp819,100	1-Jan-06	15.1%	\$89,44
2007	Rp900,560	1-Jan-07	9.9%	\$98,55
2008	Rp972,604	1-Jan-08	8.0%	\$100,99
2009	Rp1,069,865	1-Jan-09	10.0%	\$103,62
2010	Rp1,118,009	1-Jan-10	4.5%	\$125,33
2011	Rp1,290,000	1-Jan-11	15.38%	\$143,33
2012	Rp1,529,150	1-Jan-12	18,53%	\$169,90
2013	Rp2,200,000	1-Jan-13	43,88%	\$244

Sumber: www.jakarta.bps.go.id (diakses tanggal 20 November 2013)

Berdasarkan Tabel I.3, tingkat upah minimum selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya, dan kenaikan paling besar terjadi pada UMP tahun 2013 yakni sebesar 43,88% atau dari Rp 1.529.150 menjadi Rp 2.200.000. Namun menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi, selama 2013 produktivitas buruh tak meningkat walaupun sudah menerima kenaikan upah 40% khususnya di Jabodetabek. Semestinya buruh tak hanya menuntut upah namun harus meningkatkan produktivitasnya.⁹ Dalam hal kenaikan upah, buruh

⁹ <http://finance.detik.com/read/2013/08/22/134946/2337396/4/sofjan-wanandi-upah-sudah-naik-40-produktivitas-buruh-tak-meningkat> (diakses tanggal 17 November 2013)

jangan hanya berpatokan pada parameter Kebutuhan Hidup Layak (KHL), namun harus mempertimbangkan kemampuan perusahaan padat karya, bukan hanya perusahaan padat modal.

Berdasarkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesempatan kerja yang telah dijelaskan di atas, yaitu tingkat pendidikan, kemajuan teknologi, investasi, dan juga tingkat upah peneliti tertarik untuk meneliti tentang investasi dan tingkat upah provinsi DKI Jakarta guna menelaah keterkaitan antara investasi dan tingkat upah terhadap kesempatan kerja di provinsi DKI Jakarta.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh antara tingkat pendidikan dengan kesempatan kerja?
2. Apakah terdapat pengaruh antara kemajuan teknologi dengan kesempatan kerja?
3. Apakah terdapat pengaruh antara investasi terhadap kesempatan kerja?
4. Apakah terdapat pengaruh antara tingkat upah terhadap kesempatan kerja?

C. Pembatasan Masalah

Mengingat banyak dan kompleksnya permasalahan yang timbul dan tidak memungkinkannya bagi peneliti untuk membahas semua masalah di dalam penelitian ini, maka peneliti membatasi penelitian ini pada masalah pengaruh

investasi dan tingkat upah terhadap kesempatan kerja di provinsi DKI Jakarta berdasarkan periode tahun 2005 sampai dengan 2013.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka masalah penelitian yang dirumuskan yaitu “Apakah terdapat pengaruh investasi dan tingkat upah terhadap kesempatan kerja di provinsi DKI Jakarta?”

E. Kegunaan Penelitian

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaannya adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Mengembangkan pengetahuan mengenai Investasi dan Tingkat Upah yang dapat mempengaruhi kesempatan kerja di Provinsi DKI Jakarta.
 - b. Menambah wawasan mengenai Investasi dan Tingkat Upah dan dampaknya pada kondisi kesempatan kerja di Provinsi DKI Jakarta.
2. Kegunaan Praktis

Sebagai tulisan yang dapat digunakan sebagai bahan acuan juga referensi bagi peneliti selanjutnya serta sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah Indonesia pada umumnya dan pemerintah daerah DKI Jakarta pada khususnya agar bisa digunakan sebagai salah satu instrumen pemecahan masalah kesempatan kerja yang ada di lapangan.